

Evaluasi Implementasi Kebijakan Naik Kelas Otomatis Pada Siswa Sekolah Dasar Di Kecamatan Cakung

Ovi Oktavia, Nurrohmatul Amaliyah*

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia

*nurramaliyah@uhamka.ac.id

Abstract

The automatic grade promotion policy has been introduced in the implementation of the Merdeka Curriculum at the elementary school level to create inclusive and psychologically supportive learning environments. However, this policy has sparked debates regarding its effectiveness in maintaining educational quality. This study aims to evaluate the implementation of the automatic grade promotion policy in elementary schools in Cakung District, East Jakarta. The research employed a descriptive qualitative approach with a constructivist paradigm, utilizing the Discrepancy Evaluation Model (DEM) covering five stages: definition, installation, process, product, and program comparison. Data were collected through observations, interviews, and document analysis involving fifth-grade students, teachers, principals, and parents from four public elementary schools. The findings indicate that the policy aligns with the differentiation principles of the Merdeka Curriculum and is supported by institutional readiness through teacher coordination and student data management. Nevertheless, limited communication with parents has led to ethical dilemmas in assessment and a decline in student learning motivation. Overall, the automatic grade promotion policy contributes positively to students' psychological well-being but requires strengthening through the establishment of minimum competency standards and more effective communication to ensure the quality of learning outcomes.

Keywords: DEM Model; Automatic Grade Promotion; Primary School; Evaluation

Abstrak

Kebijakan naik kelas otomatis mulai diberlakukan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang inklusif dan ramah psikologis. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan terkait efektivitasnya dalam menjaga mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan naik kelas otomatis pada siswa sekolah dasar di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan model Discrepancy Evaluation Model (DEM) melalui lima tahap: definisi, instalasi, proses, produk, dan perbandingan. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek siswa kelas V, guru, kepala sekolah, serta orang tua di empat sekolah dasar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini sesuai dengan prinsip diferensiasi Kurikulum Merdeka dan didukung kesiapan institusi melalui koordinasi guru serta pengelolaan data. Namun, pada tahap proses masih terdapat keterbatasan sosialisasi kepada orang tua, yang memunculkan dilema etis dan indikasi penurunan motivasi belajar siswa. Secara keseluruhan, kebijakan naik kelas otomatis memberi dampak positif terhadap aspek psikologis siswa, tetapi memerlukan penguatan melalui penetapan standar kompetensi minimum guna menjamin kualitas pembelajaran.

Kata Kunci: Model DEM; Naik Kelas Otomatis; Sekolah Dasar; Evaluasi

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa karena berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 68 dari 81 negara (Alam, 2023), yang menandakan rendahnya capaian kompetensi siswa dalam literasi, numerasi, dan sains. Selain itu, data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) (Syafi'i, 2021) mencatat sebanyak 1.202 siswa harus mengulang kelas pada tahun 2024, suatu kondisi yang berpotensi menghambat perkembangan akademik maupun psikologis peserta didik. Di sisi lain, praktik tinggal kelas sering kali menimbulkan stigma sosial, tekanan emosional, serta menurunkan motivasi belajar siswa (Umar, 2022).

Sebagai respons atas dinamika tersebut, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 (Saidillah, 2021) mengeluarkan kebijakan naik kelas otomatis. Kebijakan ini dilandasi paradigma Merdeka Belajar yang menekankan asesmen berkelanjutan, penguatan karakter, serta inklusivitas dalam proses pembelajaran. Penerapannya diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah, menekan beban psikologis siswa, serta memberikan ruang tumbuh yang lebih adil (Aan et al., 2021). Akan tetapi, kebijakan ini juga menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan menilai bahwa naik kelas otomatis dapat menurunkan kualitas pembelajaran karena siswa yang belum menguasai kompetensi dasar tetap naik ke jenjang berikutnya (Muliastri, 2020). Fakta di lapangan, seperti yang terlihat pada siswa kelas V SDN Cakung Barat 07, menunjukkan masih adanya siswa yang belum lancar membaca dan berhitung tetapi tetap naik kelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas implementasi kebijakan tersebut dalam meningkatkan mutu Pendidikan.

Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan naik kelas otomatis diterapkan di sekolah dasar, khususnya di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Wilayah ini dipilih karena memiliki keragaman kondisi sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan, serta telah menerapkan kebijakan ini secara luas di tingkat sekolah dasar. Evaluasi kebijakan menjadi penting tidak hanya untuk menilai keberhasilan implementasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi dampak positif maupun negatif yang dirasakan oleh siswa, guru, dan orang tua (Salim Salabi, 2022). Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pengambil kebijakan, sekolah, serta masyarakat dalam menyempurnakan arah kebijakan pendidikan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Discrepancy Evaluation Model (DEM) sebagai kerangka evaluasi untuk menilai implementasi kebijakan naik kelas otomatis. Model ini dipilih karena mampu mengidentifikasi kesenjangan (discrepancy) antara standar kebijakan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Evaluasi dilakukan melalui lima tahap utama, yaitu definition stage, installation stage, process stage, product stage, dan program comparison stage. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan naik kelas otomatis pada siswa sekolah dasar di Kecamatan Cakung, sekaligus menawarkan rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis evaluasi berorientasi deskriptif (Abdussamad, 2020). Model evaluasi yang digunakan adalah Discrepancy Evaluation Model (DEM) karena model ini menekankan pada identifikasi

kesenjangan antara standar kebijakan dengan praktik di lapangan. DEM dipilih agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan naik kelas otomatis, mulai dari tahap perumusan hingga hasil, sehingga lebih relevan untuk menilai efektivitas kebijakan pendidikan. Subjek penelitian terdiri dari siswa kelas V, guru, kepala sekolah, dan orang tua di SDN Cakung Barat 01, 06, 07, dan 08 Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Informan ditentukan melalui purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam kebijakan. Jumlah informan sebanyak 32 orang, terdiri dari 16 siswa, 8 guru kelas, 4 kepala sekolah, dan 4 orang tua. Proporsi ini dipilih agar perspektif setiap pemangku kepentingan terwakili secara seimbang. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan analisis dokumen. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi proses pembelajaran, serta telaah dokumen nilai, laporan akademik, dan kebijakan sekolah. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dikategorikan sesuai lima tahap DEM. Penyajian dilakukan dalam bentuk matriks evaluasi untuk memudahkan perbandingan antara standar kebijakan dan praktik nyata. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, yang dilengkapi dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjaga keabsahan data (Sugiyono, 2020) sehingga hasil evaluasi mencerminkan kondisi riil implementasi kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

1. Tahap Definisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan naik kelas otomatis di SDN Kecamatan Cakung dilatarbelakangi oleh prinsip inklusivitas dalam Kurikulum Merdeka, yakni memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa terbebani status tinggal kelas. Guru dan kepala sekolah sepakat bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dan menghindari dampak psikologis negatif dari pengulangan kelas. Namun, data observasi menunjukkan adanya disparitas kemampuan akademik antar siswa di kelas V. Sebagian siswa belum mencapai standar kompetensi minimal (KKM), sementara yang lain telah memenuhi bahkan melampauinya. Hal ini menimbulkan potensi kesenjangan pembelajaran dalam satu rombongan belajar. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Bangun et al., 2024) bahwa implementasi kebijakan pendidikan sering menghadapi gap antara standar ideal dan realitas lapangan.

2. Tahap Instalasi

Pada tahap instalasi, sekolah telah melaksanakan koordinasi internal melalui rapat dewan guru sebelum menerapkan kebijakan. Dapat dilihat tabel dibawah ini jumlah responden penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Responden penelitian

Subjek	Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Total
Siswa kelas V	4 SDN	10 rombel	302	302
Guru	4 SDN	-	20	20
Orang tua siswa	4 SDN	-	20	20
Kepala sekolah	4 SDN	-	4	4
Total Responden				346

Hasil wawancara dengan guru menunjukkan adanya pencatatan perkembangan belajar siswa yang digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan pembelajaran di tingkat berikutnya. Guru berupaya menyusun strategi diferensiasi, seperti pemberian tugas remedial atau pendampingan tambahan, meskipun keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi kendala. Orang tua siswa juga dilibatkan melalui komunikasi informal, namun belum ada sosialisasi resmi yang menekankan bahwa semua siswa akan naik kelas secara otomatis. Dengan demikian, instalasi kebijakan telah berjalan, tetapi belum optimal dalam aspek sosialisasi dan persiapan sistem pendukung (Amrulloh, 2024).

3. Tahap Proses

Pelaksanaan kebijakan di sekolah menunjukkan bahwa guru tetap memberikan target pembelajaran agar motivasi siswa terjaga, meskipun mereka mengetahui bahwa semua siswa akan naik kelas.



Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Guru SDN Cakung Barat 06

Data wawancara memperlihatkan bahwa guru secara sengaja tidak menginformasikan detail kebijakan ini kepada siswa maupun orang tua agar mereka tetap berupaya mencapai standar yang ditetapkan. Observasi di kelas menunjukkan adanya usaha guru menyeimbangkan beban pembelajaran dengan suasana yang lebih inklusif, sehingga siswa yang memiliki keterlambatan tidak merasa tertinggal. Temuan ini menguatkan teori konstruktivisme dalam pendidikan (Marwah Sholihah & Nurrohmatul Amaliyah, 2022) bahwa realitas pembelajaran dibentuk melalui interaksi sosial dan strategi guru dalam mengelola kelas.

4. Tahap Produk

Dampak kebijakan naik kelas otomatis di SDN Kecamatan Cakung bersifat ganda. Dampak positif yang ditemukan antara lain meningkatnya rasa percaya diri siswa, suasana kelas yang lebih rileks, serta terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif. Sebaliknya, dampak negatif juga teridentifikasi, yaitu menurunnya motivasi belajar sebagian siswa karena absennya konsekuensi akademik, dilema guru dalam menetapkan penilaian, serta berkurangnya efektivitas standar KKM. Data dokumentasi menunjukkan adanya penurunan rata-rata nilai siswa pada mata pelajaran tertentu, meskipun semua siswa dinyatakan naik kelas. Hal ini sejalan dengan penelitian (Anderson & Ball, 1978) yang menegaskan bahwa penilaian tanpa konsekuensi dapat mengurangi integritas evaluasi hasil belajar.

5. Tahap Perbandingan

Hasil perbandingan antara kebijakan naik kelas otomatis dengan standar sebelumnya (Kurikulum 2013) (Prihastari, n.d.) menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi akademik menuju orientasi psikososial. Meskipun kebijakan ini mendukung prinsip pendidikan inklusif, responden penelitian mengkritisi potensi

penurunan kualitas akademik jangka panjang. Mereka menyarankan adanya penetapan kompetensi dasar minimum sebagai syarat kenaikan kelas agar siswa tetap memiliki motivasi dan standar pembelajaran tetap terjaga. Temuan ini konsisten dengan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya keseimbangan antara perkembangan karakter dan pencapaian akademik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan naik kelas otomatis di sekolah dasar pada dasarnya bertujuan menjaga aspek psikososial peserta didik, terutama untuk menghindari stigma tinggal kelas. Namun, implementasinya menimbulkan kesenjangan antara tujuan ideal dan realitas di lapangan. Pada tahap definisi, ditemukan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mendorong suasana belajar yang inklusif, sejalan dengan prinsip pendidikan untuk semua (Agustin et al., 2024). Akan tetapi, sebagian besar orang tua belum memahami sepenuhnya substansi kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan sosialisasi yang efektif agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Temuan ini menguatkan pendapat (Ambiyar & D, 2019) bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh keterlibatan semua pemangku kepentingan.

Pada tahap instalasi, guru dan sekolah telah mengupayakan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Namun, keterbatasan dalam pemahaman kurikulum baru serta kebutuhan pelatihan lanjutan membuat implementasi kebijakan belum optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian (Amrulloh, 2024) yang menegaskan bahwa kualitas guru dan kesiapan mereka menghadapi perubahan kurikulum menjadi faktor kunci keberhasilan reformasi pendidikan.

Selanjutnya, pada tahap proses, guru tetap berusaha menjaga kualitas pembelajaran dengan memberikan diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Akan tetapi, motivasi belajar siswa cenderung menurun karena adanya persepsi bahwa apapun hasil belajar, mereka tetap naik kelas. Temuan ini sesuai dengan pandangan (Ariyana et al., 2018) dalam teori self-determination, bahwa motivasi intrinsik siswa akan berkurang apabila tidak ada tantangan atau standar pencapaian yang jelas. Pada tahap produk, dampak kebijakan terlihat dari meningkatnya rasa percaya diri siswa serta berkurangnya tekanan psikologis akibat tidak ada ancaman tinggal kelas.

Namun, rata-rata capaian nilai akademik mengalami penurunan setelah kebijakan diterapkan. Kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks antara pencapaian akademik dan kenyamanan psikososial. Penelitian yang dilakukan oleh (Sijabat et al., 2022) juga menemukan bahwa ketika evaluasi pendidikan hanya menekankan aspek non-akademik, kualitas hasil belajar cenderung terabaikan. Pada tahap perbandingan, mayoritas responden menilai bahwa kebijakan naik kelas otomatis lebih menekankan pada aspek sosial-emosional dibandingkan akademik. Hal ini menegaskan perlunya keseimbangan dalam kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, penerapan standar kompetensi minimal yang jelas menjadi penting untuk menjaga mutu pembelajaran.

Rekomendasi ini sejalan dengan pemikiran (Prasetia et al., 2023) yang menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus berorientasi pada keseimbangan antara perkembangan kognitif, afektif, dan sosial peserta didik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan naik kelas otomatis memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, ia memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri siswa dan suasana kelas yang lebih inklusif. Di sisi lain, terdapat risiko menurunnya standar akademik apabila tidak diimbangi dengan evaluasi berkelanjutan dan strategi pembelajaran yang adaptif. Dengan demikian, implementasi kebijakan perlu disertai mekanisme evaluasi yang jelas, penguatan kapasitas guru, serta sosialisasi yang komprehensif kepada orang tua agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan naik kelas otomatis di sekolah dasar memberikan dampak ganda yang perlu diperhatikan secara serius. Pertama, kebijakan ini mendukung inklusivitas pembelajaran dan memberikan manfaat psikososial bagi siswa, terutama dalam meningkatkan rasa percaya diri serta memberi kesempatan setara bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Kedua, kebijakan ini berpotensi menimbulkan risiko berupa penurunan motivasi belajar, dilema etis dalam penilaian, serta indikasi menurunnya kualitas capaian akademik. Ketiga, agar implementasi kebijakan tetap sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka, diperlukan batasan kompetensi minimum, strategi sosialisasi yang efektif kepada orang tua, serta penguatan kapasitas guru dalam mengelola pembelajaran diferensiasi. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran empiris mengenai tantangan dan peluang kebijakan naik kelas otomatis, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi dan instrumen evaluasi yang menjamin mutu pendidikan dasar tetap terjaga.

Daftar Pustaka

- Aan, W., Saidatul, I., & Kholida, F. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis di Sekolah Dasar. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 16(2), 102–107.
- Abdussamad, Z. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Agustin, R., Hidayat, W., & Lubis, R. H. H. (2024). Pengaruh Kurikulum Merdeka Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV di SDN 106184 Sekip Lubuk Pakam Tahun Ajaran 2022/2023. *Tematik: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 3(2), 116–120.
- Alam, S. (2023). *Hasil PISA 2022: Refleksi Mutu Pendidikan Nasional 2023*.
- Ambiyar, & D, M. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program* (1st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Amrulloh, H. A. (2024). Analisis Kesiapan Guru Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 01 Cilacap.
- Anderson, S. B., & Ball, S. (1978). *The Profession and Practice of Program Evaluation*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Ariyana, Y., Pudjiastuti, A., Bestary, R., & Zamroni. (2018). Buku Pegangan Pembelajaran Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Berbasis Zonasi. In *Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi Pada Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Bangun, P. Y., Eddiyanto, E., & Munthe, S. D. (2024). The Influence of the Project-Based Learning Model on Student Learning Outcomes on the Acid-Base Concept (A Case Study at Senior High School No. 2 Medan). *Chimica Didactica Acta*, 12(1), 1–5.
- Gunawan, R., Lestariningsih, A. D., & Sardiman. (n.d.). *Sejarah Indonesia: Buku Guru*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Marwah Sholihah, & Nurrohmatul Amaliyah. (2022). Peran Guru Dalam Menerapkan Metode Diskusi Kelompok Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas V Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 898–905.
- Muliastri, K. E. (2020). New Literacy Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Abad 21. *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 4(1), 115–125.

- Prasetya, I., Akrim, Sulasmi, E., Murniati, Yuswardi, & Nurhasana. (2023). Pelatihan Total Quality Management Berbasis Kompetensi Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yayasan Perguruan Taman Siswa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 29(3), 524–529.
- Prihastari, E. B. (2020). Pelatihan Assesmen Kurikulum Merdeka Bagi Guru SD di Kecamatan Selo, Boyolali. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 477–481.
- Saidillah, A. (2021). Kesulitan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 1(2), 214–235.
- Salim Salabi, A. (2022). Efektivitas Dalam Implementasi Kurikulum Sekolah. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 1(1), 1–13.
- Sijabat, O. P., Manao, M. M., Situmorang, A. R., Hutauruk, A., & Panjaitan, S. (2022). Mengatur Kualitas Guru Melalui Program Guru Penggerak. *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa)*, 2(1), 130–144.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i, F. F. (2021). Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar “Merdeka Belajar Dalam Menyambut Era Masyarakat 5.0”* (pp. 46–47).
- Umar. (2022). Komunikasi Pembelajaran di Era Digital. In *PT Literasi Nusantara Abadi Grup* (pp. 1–23).